PENOLAKAN PEMBATALAN NIKAH DI BAWAH USIA KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Mukhammad Luqmanul K

Desa Sedengan Mijen RT.01 RW.01 Kecamatan Krian Kabupaten
Sidoarjo. E-mail: lucky33@gmail.com

Abstract: *This study examines the legal consideration basis of the judge's decision of Surabaya Religious Court No. 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. about the denial of cancellation of underage marriage and the juridical analysis against Religious Court's Decision in Surabaya. The data are collected by using the documentary technique, namely from the verdict, the secondary books, articles, act, and interview. Furthermore, the data are analyzed by the descriptive method and deductive mindset. That is to describe and interpret the collected data with the general theory about the rejection of the cancellation of marriage in procedural law of Religious Court. It is then used to analyze the Religious Court's decision in Surabaya in the case of rejection of the cancellation of the underage marriage submitted by applicant to the Head Office of Religious Affairs of Sukomanunggal, Surabaya. The research concludes that, the legal consideration basis of the judge's decision of Surabaya Religious Court No. 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. is by looking the marriage law which includes the criteria of marriage that can be canceled. The judge refused a request of the applicant due to the consideration of profit (masalah). It was since the defendant II was in 8 months pregnant. So that, the marriage annulment petition was rejected by the judge of the Religious Court in Surabaya through decision No. 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby..*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan Nomor:5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. tentang penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin serta analisis yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumenter yaitu mengumpulkan data dan informasi dari putusan, buku sekunder, artikel dan Undang-Undang dan sebagai pengayaan data dilakukan teknik wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif. yaitu menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan teori-teori yang bersifat umum tentang penolakan pembatalan nikah dalam hukum acara peradilan agama yang kemudian digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan agama surabaya dalam kasus penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin yang diajukan oleh pemohon Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sukomanunggal Kota Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara Nomo:5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. adalah dengan melihat undang-undang. Perkawinan tersebut, termasuk kriteria perkawinan yang dapat dibatalkan bukan perkawinan batal. Majelis hakim menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan kemaslahatan. Dikarenakan termohon II sudah hamil 8 bulan, dan lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya jika perkawinan tersebut dibatalkan, maka permohonan pembatalan nikah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya melalui putusan Nomor:5157/Pdt.G/2012/PA.Sby..

Kata Kunci: pembatalan nikah dan usia kawin

Pendahuluan

Pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dua macam, yaitu: perkawinan batal dan perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan batal adalah suatu perkawinan yang sejak semula dianggap tidak ada.¹ Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami-istri, tetapi salah satu pihak dapat meminta kepada Pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan.²

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menyatakan: *“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”* Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan: *“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.”*³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 mengatur tentang perkawinan yang dapat dibatalkan, yaitu:

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet 5 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 70

² Ibid, 71

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang *mafqud*.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami yang lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁴

Istilah pembatalan nikah tidak dikenal dalam Islam, hukum Islam hanya mengenal *fasakh* nikah yang mempunyai arti batal. Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian, yaitu memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan negara.

Berkaitan pembatalan perkawinan tersebut, penulis menemukan kasus di Pengadilan Agama Surabaya yang menolak perkara pembatalan nikah di bawah usia kawin yang termaktub dalam putusan nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. Permohonan pembatalan nikah tersebut disebabkan karena diketahui usia dari salah satu pihak belum mencapai usia kawin dan tidak adanya dispensasi dari Pengadilan Agama.

Batas usia dewasa untuk calon mempelai secara jelas diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan rumusan sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.⁵

⁴ Pasal 71 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV Pasal 15 mempertegas persyaratan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.⁶

Atas dasar tersebut, pemohon dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, mengajukan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Surabaya. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim karena termohon II hamil dengan usia kadungan 8 bulan dan dirasa lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya jika perkawinan tersebut dibatalkan. Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik meneliti putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 5157/Pdt.G/2012 Tentang Penolakan Pembatalan Nikah di bawah usia kawin menggunakan perspektif yuridis.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sumber data primernya adalah putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. dan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menangani perkara. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku maupun literatur lain. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 15 Ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

melalui dokumen.⁷ Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen putusan nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. Sedangkan wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang. Dalam hal ini, melibatkan penulis yang ingin memperoleh informasi dari Majelis Hakim yang mengadili perkara pembatalan nikah Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁸

Setelah data yang berkaitan dengan putusan Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. terkumpul, maka penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menolak permohonan pembatalan. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki⁹

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan Undang-Undang yang menjelaskan tentang perkawinan, khususnya dalam hal batalnya perkawinan. Selanjutnya konsep dasar itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu pertimbangan Hakim beserta dalil-dalil hukum yang digunakan dalam menolak permohonan pembatalan nikah di bawah usia nikah dalam putusan nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan.

Pengertian Pembatalan Nikah

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam pemutusan permohonan pembatalan perkawinan, Pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan

⁷ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 28

⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet IV (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 180

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

agama mempelai. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 22, 24, 26 dan 27 serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 dan 71.

Menurut Al-jaziri, pembatalan perkawinan adalah jika perkawinan yang telah dilakukan oleh seseorang tidak sah karena kekhilafan dan tidak ketahuan atau tidak sengaja dan belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, yang melakukan perkawinan itu dipandang tidak berdosa. Jika telah terjadi persetubuhan, maka persetubuhan itu dipandang sebagai *wathi*” *syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinahan. Yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi zina. Istri diwajibkan beriddah apabila pernikahan telah dibatalkan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayahnya dan ibunya. Tetapi jika perkawinan karena sengaja melakukan kesalahan, seperti memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu, atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perkawinan yang semikian itu wajib dibatalkan.

Pengaturan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dibawah titel “Batalnya Perkawinan”, kemudian ditindak lanjuti dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹⁰

Sebenarnya istilah “Batalnya Perkawinan” itu tidaklah tepat. Akan lebih tepatnya kalau dikatakan “dibatalkannya perkawinan”, sebab bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke Pengadilan. Kalau demikian, istilahnya bukan *nieteg* (batal),

¹⁰Rahmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 284.

melainkan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan).¹¹ Perbedaan antara pembatalan perkawinan dan pencegahan perkawinan adalah dalam hal pencegahan. Perkawinan dimaksud belum dilangsungkan, sedangkan dalam pembatalan, perkawinan dimaksud sudah dilangsungkan. Berhubung oleh karena itu tentulah dapat dibayangkan perbedaan akibat dari pencegahan dan pembatalan suatu perkawinan. Sedangkan persamaannya, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka haruslah melalui Pengadilan untuk mencegah dan membatalkannya.¹²

Terhadap perkawinan yang kemudian ternyata tidak memenuhi syarat-syarat, namun perkawinannya sudah dilangsungkan, maka dapat dibatalkan. Pengertian dapat dibatalkan di sini menurut penjelasan atas Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Selain itu suatu perkawinan dapat dimintakan pembatalannya apabila perkawinan itu dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Hak untuk membatalkan perkawinan yang demikian ini oleh suami atau istri menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.¹³

Faktor-faktor yang Membatalkan Perkawinan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur tentang faktor-faktor yang bisa menjadi alasan untuk pembatalan perkawinan, apabila:

¹¹R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1974), 35.

¹² K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1976), 29.

¹³Rahmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 67

1. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan¹⁴
2. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya¹⁵
3. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
4. Perkawinan yang dilangsungkannya di depan Pegawai Pencatat Nikah tanpa dihadiri 2 orang saksi¹⁶
5. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum¹⁷
6. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.¹⁸

Selain itu dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri orang lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.¹⁹

Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan

¹⁴ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵ Ibid, Pasal 24

¹⁶ Ibid, Pasal 26

¹⁷ Ibid, Pasal 27 Ayat 1

¹⁸ Ibid, Pasal 27 Ayat 2

¹⁹ Pasal 71 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 23 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 73, yaitu:

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 73

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi jalannya perkawinan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.²⁰

Pada Pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan dan permohonan pembatalan perkawinan itu diajukan oleh para pihak yang mengajukan pada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri.²¹ Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat

²⁰ Ibid, Pasal 73

²¹ Ibid. Pasal 74 ayat 1

kontensius (sengketa).²² Sehingga dapat lebih jelas dalam melangsungkan pembatalan perkawinan yaitu sama halnya dengan cara gugatan perceraian yang diatur secara terperinci dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sepanjang hal ini dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pembatalan perkawinan itu.

Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi selain beragama Islam di dalam daerah hukum dimana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri). Atau bisa juga di tempat tinggal salah satu pasangan tersebut.

Prosedur pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama seperti pengajuan proses perceraian, dan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan dan diputuskan oleh Hakim. Tata cara permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut:²³

1. Permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon atau kuasanya diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kediaman termohon, yang isinya memberitahukan niat untuk membatalkan perkawinan tersebut disertai dengan alasan-alasan yang dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan tersebut. Dalam hal permohonan tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan di tempat pemohonan. Dalam hal termohon berada diluar Negeri, maka Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan pembatalan perkawinan tersebut kepada termohon melalui perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang

²² Ahrum Khoirudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 14

²³<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131130-T%2027460-Analisis%20terhadap%20Kesimpulan%20dan%20Saran.pdf> (diakses 12 April 2015)

- Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
2. Pengadilan memanggil termohon secara tertulis dengan melampirkan permohonan mengenai pembatalan perkawinan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 3(tiga) hari sebelum persidangan pemeriksaan dilakukan (Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
 3. Pengadilan memeriksa permohonan pembatalan perkawinan tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan diajukan (Pasal 38 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Jika termohon berada diluar Negeri maka pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak gugatan diterima di Pengadilan Negeri.
 4. Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.
 5. Apabila keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan yang tetap, panitera Pengadilan menyampaikan 1 lembar dari keputusan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah, untuk selanjutnya oleh Pegawai Pencatat Nikah dicatat pada daftar yang di peruntukkan untuk itu.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan, terhitung sejak tanggal hari keputusan Pengadilan tentang pembatalan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Keputusan itu berlaku surut sejak tanggal hari dilangsungkan perkawinan (Pasal 28 ayat 1 Undang- Undang Perkawinan). Selama keputusan Pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka suatu perkawinan akan tetap sah walaupun ada cacat di dalamnya. Tujuan Undang-Undang mengatur demikian adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang ada atau tidaknya suatu perkawinan. Kepastian hukum dalam suatu perkawinan dapat dikatakan merupakan syarat utama, oleh karena perkawinan tidak

hanya menyangkut pribadi orang-orang yang terikat dalam perkawinan tersebut, melainkan juga mengikat kepentingan umum.²⁴

Pembatalan perkawinan ditujukan semata-mata agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu tetap terlindungi oleh hukum. Karena dengan adanya kekurangan persyaratan atau dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah, sehingga secara sepiantas terkesan kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dinyatakan tidak sah tersebut, merupakan anak yang tidak sah pula menurut hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sah tidaknya suatu perkawinan oleh Negara ditentukan pula oleh sah atau tidaknya perkawinan itu menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pada dasarnya Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara panjang lebar mengenai masalah akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Begitu juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak mengatur lebih lanjut mengenai akibat pembatalan perkawinan.

Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan adanya keputusan yang berkekuatan tetap perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada. Pembatalan itu tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan. Hal ini adalah pantas berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang berarti kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas dan resmi

²⁴Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Cet 2, Ed. 1, (Jakarta: Badan Penerbit, FH. UI, 2004), 70.

sebagai anak dari orang tua mereka. Oleh karena itu pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan hilangnya status anak-anak.

2. Suami atau istri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan itu didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pihak-pihak yang beritikad baik dilindungi dari segala akibat-akibat batalnya perkawinan, sehingga akibat yang bisa menimbulkan kerugian akibat pembatalan harus dipikulkan kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik yang menjadi sebab alasan pembatalan perkawinan, kecuali terhadap harta bersama. Sepanjang mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dianggap sah sebagai harta kekayaan perkawinan yang pelaksanaan pemecahan pembagiannya dipedomani ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Yaitu harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Juga terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-ikatan hukum dibidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh suami istri sebelum pembatalan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami-istri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung-menanggung (*hoofdelijke*), baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi.²⁵

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. Tentang Penolakan Pembatalan Nikah

Dasar pertimbangan hakim terhadap penolakan pembatalan nikah, karena pernikahan di lakukan di bawah usia nikah tanpa ada izin dispensasi dari Pengadilan Agama. Namun sebelum memberi keputusan sebagaimana yang telah terlampir pada perkara Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby., majlis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

²⁵Pasal 28 Ayat 2 Sub C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Termohon I (mempelai laki-laki) dan Termohon II (mempelai perempuan) telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 06 November 2012. Pada saat menikah, Pegawai Pencatat Nikah tidak cermat sehingga tidak mengetahui jika usia termohon I masih belum mencapai batas usia nikah. Pada saat melangsungkan perkawinan termohon I masih berusia delapan belas (18) tahun lebih empat (4) bulan, tanpa adanya izin dispensasi dari Pengadilan Agama pernikahan itu dilangsungkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Di kemudian hari Kepala Kantor Urusan Agama tersebut mengetahui jika usia termohon I belum mencapai 19 tahun.

Empat belas (14) hari setelah pernikahan termohon dilangsungkan, ketika data dimasukkan ke dalam simkah (sistem komputerisasi nikah), Pemohon I, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya mengetahui termohon I belum mencapai batas usia nikah. Kemudian pemohon I mengajukan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Surabaya, dengan alasan :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya sebagai lembaga yang berwenang untuk itu, nyata-nyata telah dirugikan atas kejadian tersebut.
2. Atas kejadian tersebut di atas, Termohon I tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang demikian tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana telah ditetapkan dalam aturan hukum yang berlaku dan harus pula dinyatakan telah cacat hukum.
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya sebagai pejabat yang berwenang untuk melaksanakan / mencatat/mengawasi pelaksanaan perkawinan berpendapat telah cukup alasan yang berdasar atas hukum guna mengajukan permohonan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Surabaya.
4. Ketidacermatan Pegawai Pencatat Nikah dalam meneliti batas usia nikah Termohon I menjadikan pernikahan Termohon I dengan Termohon II dinilai melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :²⁶

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578050912620001 tanggal 02-05-2012, atas nama Pemohon, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Kw.13.1/2/ Kp.07.6/658/2011 tanggal 28 Januari 2011, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, ditandai dengan (P.2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah (N-1) dan Surat Keterangan Asal Usul (N-2) Nomor : 474.2/25/436.11.27.3/2012, tanggal 09 Oktober 2012 An. XXXX, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalianak Kecamatan Asemrowo Surabaya, ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N-4) Nomor : 474.2/25/436.11.27.3/2012, tanggal 09 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalianak Kecamatan Asemrowo Surabaya, dan Surat Izin Orang Tua (N-5), bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125609/06/00165 tanggal 09 Mei 2006, An. XXXX, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Data Akta Nikah Surat Model N Nomor : XXXX, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6)
7. Selain itu pemohon juga menghadirkan ke persidangan dua orang saksi

Bahwa selanjutnya dalam mengambil hukum, Pengadilan Agama Surabaya juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

²⁶ Salinan Putusan No: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima.

Majelis hakim dan mediator yang ditunjuk, telah mengupayakan agar Pemohon mau mencabut permohonannya, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga telah memenuhi ketentuan Perma 1 Tahun 2008.

Atas permohonan pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut :

1. Termohon I dan Termohon II pada saat melangsungkan pernikahan telah melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahan yang ditentukan oleh Kantor Urusan Agama setempat.
2. Termohon I menerangkan ketika menikah umurnya belum genap 19 tahun, tetapi Termohon I tidak mengetahui kalau umurnya belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.
3. Petugas Kantor Urusan Agama setempat tidak pernah menolak atau mengingatkan kepada Termohon I kalau umurnya belum cukup untuk menikah.
4. Termohon I dan Termohon II keberatan kalau pernikahannya dibatalkan karena Termohon II saat ini telah hamil 8 bulan.

Selain itu, Termohon I dan Termohon II memberikan bukti-bukti yaitu :²⁷

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 06 Nopember 2012, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya,

²⁷ Salinan Putusan No: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby

- dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, diberi tanda (T.1).
2. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578281607940001 tanggal 042-05-2012, atas nama Termohon I, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, ditandai dengan (T.2).
 3. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578275509930002 tanggal 22-11-2011, atas nama Termohon II, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, ditandai dengan (T.3).

Sebagaimana bukti P.1 dan P.2, Pemohon yang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, telah mengajukan perkara permohonan Pembatalan Perkawinan atas Termohon I dan Termohon II hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Sebagaimana bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan perkawinannya telah menempuh prosedur dan melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan. Dengan demikian, Termohon I dan Termohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang diperkuat oleh bukti T.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka dinyatakan terbukti bahwa Termohon I adalah suami dari Termohon II, dan berdasarkan bukti T.2 dan T.3, Termohon I dan Termohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **XXXX**, dan **XXXX**, dan Termohon I dan Termohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX**, yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena keterangannya bersumber dari penglihatan

dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, Pasal 171 HIR dan 172 HIR), sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Seseorang untuk melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila perkawinan telah dilaksanakan sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama (vide Pasal 22 dan 23 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam);

Dasar atau alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah karena sewaktu Termohon I menikah dengan Termohon II, usia Termohon I belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Majelis Hakim berpendapat, dengan tidak terpenuhinya syarat batas minimal usia perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah menjadikan perkawinan tersebut batal demi hukum, akan tetapi termasuk dalam kriteria perkawinan yang dapat dibatalkan (ex Pasal 71 huruf d Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, Pasal 71 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut mempunyai arti fakultatif, yakni boleh jadi batal boleh jadi tidak batal, bukan mempunyai arti imperatif, yakni mesti harus dibatalkan dalam arti tidak ada pilihan lain (ex penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);²⁸

Untuk menentukan batal atau tidaknya suatu perkawinan adalah sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tentunya dengan berpedoman pada hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping juga dengan memperhatikan

²⁸ Rusydiana, wawancara, Surabaya, 23 Maret 2015.

mana yang dirasa lebih memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan bagi pasangan suami isteri (ex Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, majelis hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Nopember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal;
2. Bahwa, Termohon I dan Termohon II keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab atau hubungan susuan;
3. Bahwa, pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah memenuhi rukun-rukun pernikahan sebagaimana yang disyari'atkan dalam Islam;
4. Bahwa, sewaktu Termohon I menikah dengan Termohon II umurnya belum genap 19 tahun;
5. Bahwa, saat perkara a quo disidangkan Termohon II tengah hamil dengan usia kandungan 8 bulan;
6. Bahwa, Termohon I dan Termohon II keberatan pernikahannya dibatalkan;

Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana yang disyari'atkan dalam agama Islam dan telah pula sesuai dengan yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal tidak meneliti dengan seksama persyaratan nikah Termohon I dan Termohon II. Dengan demikian, majelis hakim menilai Pemohon, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang belum genap berusia 19 tahun. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Terlepas dari akibat kelalaian Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Termohon I dan Termohon II dalam mengurus persyaratan pernikahannya, telah melampirkan syarat-syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan, namun oleh karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah yang tidak cermat meneliti umur Termohon I menjadikan pernikahan Termohon I dengan Termohon II dinilai melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Baik Pemohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal maupun Termohon I dan Termohon II, tidak ada yang dengan sengaja beritikad tidak baik dengan memalsukan data atau identitas Termohon I dan Termohon II, dengan diketahui adanya kekurangan umur Termohon I setelah pernikahan bukanlah karena kesengajaan tetapi terjadi karena semata-mata ketidakcermatan Pegawai Pencatat Nikah dalam memeriksa data dan identitas Termohon I dan Termohon II.

Dari fakta-fakta di atas, majelis hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Rusydiana sebagai Ketua Majelis, Drs. Sulaiman, M.Hum. sebagai Hakim Anggota, Drs. H. Munadi M.H sebagai Hakim Anggota, Fitriyadi S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, menilai alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II berdasarkan hukum telah terbukti. Namun demikian dengan mencermati pernikahan Termohon I dan Termohon II yang telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang disyari'atkan dalam Islam, dengan melihat kondisi Termohon II yang saat ini tengah hamil 8 bulan, dan Termohon I maupun Termohon II menyatakan keberatan perkawinannya dibatalkan. Dengan tanpa mengurangi maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim menilai jika pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan akan lebih banyak menimbulkan kemadlaratan, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat dan berpendapat, hal yang dirasa lebih memenuhi rasa keadilan dan maslahat bagi pasangan suami isteri dalam perkara aquo adalah dengan mempertahankan perkawinan Termohon I dan Termohon II, dengan demikian permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Majlis hakim sepakat untuk menolak permohonan pemohon dan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya pada hari selasa tanggal 06 November 2012 dan menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 123456789 tanggal 06 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya tetap berkekuatan hukum serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby.

Secara yuridis, majelis hakim mengacu pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah menjadikan perkawinan itu batal demi hukum, akan tetapi termasuk dalam kriteria perkawinan yang dapat dibatalkan. Dalam Pasal 71 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa suatu perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan dalam Pasal 71 huruf d Kompilasi Hukum Islam tersebut mempunyai arti fakultatif yakni boleh dibatalkan, bukan mempunyai arti imperatif, yakni harus dibatalkan dalam arti tidak ada pilihan lain

Batal atau tidaknya suatu perkawinan, adalah sepenuhnya kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tentunya dengan berpedoman pada hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga dengan memperhatikan mana yang dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan bagi pasangan suami istri (Pasal 58

ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata pernikahan Termohon I dan Termohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana yang disyariatkan Islam dan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.²⁹ Dalam pencatatan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya tidak meneliti dengan seksama persyaratan nikah Termohon I dan Termohon II. Dengan demikian, majelis hakim menilai Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang belum genap berusia 19 tahun. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.³⁰

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.³¹

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

²⁹ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: “Untuk Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul.

³⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

³¹ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.³²

Secara filosofis majelis hakim mengemukakan, bahwa terjadi kesulitan dalam penerapannya ketika dihadapkan pada kenyataan hidup masyarakat yang harus ditemukan penyelesaiannya, sehingga jawabanya adalah kembali pada hati nurani para majlis hakim itu sendiri. Pertimbangan majelis hakim adalah dikarenakan Termohon II sudah mengandung 8 bulan yang merupakan anak Termohon I, dan dikarenakan Termohon I tersebut ingin bertanggung jawab atas anak yang sudah dikandung oleh Termohon II. Jikalau perkawinan tersebut dikabulkan pembatalan nikahnya oleh majelis hakim maka Termohon I dan Termohon II juga merasa sangat keberatan.³³

Salah satu alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk menolak permohonan dari pemohon adalah dirasa lebih banyak maslahatnya dari pada mudaratnya jika perkawinan itu tidak dibatalkan. Majelis Hakim menilai Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang belum genap berusia 19 tahun.

Adapun di dalam pengakuannya Kepala Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukomanunggal maupun Termohon I dan Termohon II, tidak ada yang dengan sengaja beritikad tidak baik dengan memalsukan data atau identitas Termohon I dan Termohon II, akan tetapi adanya kekurangan umur Termohon I setelah terjadinya pernikahan bukanlah kesengajaan tetapi terjadi karena semata-mata ketidak cermatan Pegawai Pencatat Nikah dalam memeriksa data dan identitas Termohon I dan Termohon II.

³² Ibid Pasal 7

³³ Rusydiana, *Wawancara*, Surabaya, 23 Maret 2015

Majelis hakim melihat keadaan demikian jika dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, maka kehidupan Termohon menjadi tidak menentu dan berpotensi melakukan dosa besar, karena meskipun Termohon I pada saat menikah umurnya belum mencapai batas usia nikah dan tanpa minta izin dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Surabaya, namun perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Hanya dikarenakan Pegawai Pencatat Nikah tersebut kurang cermat/teliti dalam memeriksa data administrasi Termohon I. Dari penjelasan tersebut dirasa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat batas usia untuk melangsungkan pernikahan.³⁴

Sehingga agar perkawinan Termohon I dan Termohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah, majelis hakim bermusyawarah dan hasilnya yaitu perkara pengajuan pembatalan nikah oleh pemohon tersebut ditolak oleh Majelis Hakim, dan para Termohon juga keberatan jikalau perkawinannya itu dibatalkan karena Termohon II sudah hamil 8 bulan.

adapun apabila permohonan pembatalan nikah tersebut dikabulkan oleh majelis Hakim sehingga perkawinan Termohon I dan Termohon II batal, maka kedua mempelai tersebut beserta keluarganya akan malu jika masyarakat mengetahui jika perkawinannya itu belum memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby.

Dari dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. tersebut, dapat dilihat bahwa dasar dan pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal melakukan perkawinan dan Pasal 71 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Dalam kedua Pasal tersebut sudah jelas disebutkan bahwa minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun.

³⁴ Rusydiana , *Wawancara*, Surabaya, 23 Maret 2015

Konsekuensinya, apabila kurang dari batas tersebut maka perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dikarenakan orang tersebut melanggar Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pernikahan tersebut syarat-syarat pernikahan tidak terpenuhi sepenuhnya yaitu usia mempelai laki-laki tidak mencapai 19 tahun hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sumber hukum materiil tentang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim dalam memutuskan perkara tentang perkawinan juga harus mengacu pada Undang-Undang tersebut. Maka dari itu penulis sependapat dengan putusan Hakim karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, dikarenakan jika perkawinan Termohon dibatalkan akan berdampak pada nasab anak yang telah dikandung oleh Termohon II yang telah mengandung 8 bulan.

Termohon juga sangat keberatan jika perkawinan tersebut dibatalkan karena termohon akan malu kepada masyarakat jika mengetahui kalau syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut belum terpenuhi dan pada status anak yang sedang dikandung oleh Termohon II. Salah satu alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk menolak permohonan dari pemohon adalah dirasa lebih banyak maslahatnya dari pada mudaratnya jika perkawinan itu tidak dibatalkan

Memang dalam putusannya, hakim tidak hanya memandang dari hukum materiil saja, tetapi juga dari beberapa pertimbangan hukum diantaranya pertimbangan filosofis, sosiologis dan pemenuhan rasa keadilan. Selain itu, kesalahan tersebut berasal dari ketidakcermatan Pegawai Pencatat Nikah yang mengecek syarat-syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan.

Dari perkara ini, yang seharusnya diperhatikan oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam melakukan pencatatan, mereka harus lebih teliti dalam melakukan *rafu'* atau verifikasi data orang yang ingin

melaksanakan pencatatan perkawinan, agar tidak terulang lagi kasus-kasus seperti ini. Adapun Hakim dalam penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dikarenakan perkawinan tersebut termasuk dalam kriteria perkawinan yang boleh dibatalkan, bukan termasuk dalam kriteria perkawinan batal, karena jika dibatalkan akan menimbulkan masalah baru pada pernikahan tersebut.

Penutup

Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. menolak permohonan pembatalan nikah yang telah diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Berdasarkan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. tentang penolakan permohonan pembatalan nikah di bawah usia nikah, majelis hakim memberikan putusan tersebut dikarenakan Termohon II sudah hamil 8 bulan, jika perkawinannya dibatalkan akan lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya, dan akan menimbulkan masalah baru pada perkawinan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahrum Khoirudin, *Pengadilan Agama*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. IV, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia, 1976.
- M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1974.
- Rahmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Salinan Putusan No: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Cet 2, Ed. 1, Jakarta: Badan Penerbit, FH. UI, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131130-T%2027460-Analisis terhadap Kesimpulan % 20 dan %20 Saran.pdf](http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131130-T%2027460-Analisis%20terhadap%20Kesimpulan%20dan%20Saran.pdf)
(diakses 12 April 2015)